

KOTA BLITAR



RENJA

(RENCANA KERJA)

TAHUN 2023

DINAS SOSIAL KOTA BLITAR

Jl. Jawa No. 64 A

KATA PENGANTAR

Dalam upaya mewujudkan pelayanan kesejahteraan sosial diperlukan penyusunan perencanaan yang memuat kebijakan teknis pembangunan di bidang sosial baik jangka panjang, menengah sampai dengan tahunan. Dokumen perencanaan tahunan atau yang biasa disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah yaitu perencanaan tahunan suatu Perangkat Daerah yang berisikan program, kegiatan sub kegiatan dan kebutuhan anggaran yang diperlukan. Disamping itu Rencana Kerja Perangkat Daerah juga memuat evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya juga perkiraan penganggaran satu tahun ke depan.

Dinas Sosial Kota Blitar adalah salah satu Perangkat Daerah di Kota Blitar yang mengemban tugas pokok dan fungsi urusan pemerintahan daerah di bidang sosial. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Sosial menyusun dokumen Rencana Kerja sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan selama kurun waktu satu tahun dengan berpedoman pada Renstra Dinas Sosial tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar. Oleh karena itu puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya sehingga Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Blitar Tahun 2023 dapat tersusun.

Selain sebagai pedoman pelaksanaan kerja, Rencana Kerja juga berfungsi sebagai instrumen guna monitoring, evaluasi dan pengendalian program, kegiatan dan sub kegiatan yang dapat dijadikan tolok ukur untuk penyusunan kebijakan/program kerja selanjutnya.

Blitar, 04- 03 -2022


KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA BLITAR
SAD SASMINTARTI, SH, MM
Pembina Tk. I
NIP. 196601191986022002

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial	28
2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Sosial	31
2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD	32
2.5 Penelaahan Usulan Pogram dan Kegiatan Masyarakat.....	47
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN	
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi	51
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Sosial	52
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	55
BAB V PENUTUP	70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Disamping itu penyusunan Renja Perangkat Daerah dilaraskan dengan dokumen perencanaan di tingkat pusat maupun provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah (PD) menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja tahun berjalan.

Review hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan pencapaian target kinerja Renstra Perangkat Daerah ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Secara ringkas penyusunan Renja Dinas Sosial Kota Blitar terdiri dari 4 (empat) tahapan, yaitu:

1. Tahapan Persiapan; meliputi proses
 - (1) Pembentukan SK tim penyusun renja
 - (2) Orientasi tim kerja
 - (3) Penyusunan agenda tim kerja
 - (4) Penyiapan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Renja Dinas Sosial Kota Blitar.

2. Tahapan Penyusunan rancangan Renja Dinas Sosial Kota Blitar tahun 2023; meliputi proses :

- a. Penyusunan mengacu pada rancangan awal RKPD Kota Blitar 2023 dan Renstra Dinas Sosial Kota Blitar Tahun 2021-2026 yang mengacu kepada RPJMD Kota Blitar 2021- 2026
- b. Mengacu pada evaluasi program dan kegiatan tahun sebelumnya
- c. Memecahkan masalah yang sedang dihadapi
- d. Berdasarkan usulan program dan kegiatan dari masyarakat.

3. Pelaksanaan Forum OPD.

Dilakukan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah

Adapun tujuan pelaksanaan forum SKPD adalah untuk :

- a) Penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan;
- b) Penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- c) Penyelarasan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah; dan
- d) Penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah, sesuai dengan surat edaran Walikota Blitar tentang rancangan awal RKPD.

4. Penetapan Renja Dinas Sosial Kota Blitar Tahun 2023

Proses penetapan Renja Dinas Sosial Kota Blitar dilakukan setelah adanya penetapan RKPD Kota Blitar Tahun 2023. Langkah terakhir proses dari penyusunan rancangan Renja Dinas Sosial Kota Blitar adalah melakukan penyempurnaan berdasarkan RKPD yang telah ditetapkan, selanjutnya dilakukan verifikasi terhadap Renja Dinas Sosial Kota Blitar oleh tim penyusun RKPD. Verifikasi dilakukan untuk memastikan rancangan Renja Dinas Sosial Kota Blitar sesuai dengan RKPD yang telah ditetapkan. Hasil verifikasi Renja SKPD yang telah sesuai dengan RKPD selanjutnya disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Blitar kepada Walikota Blitar melalui Bappeda Kota Blitar untuk mendapatkan pengesahan, dan selanjutnya Renja Perangkat Daerah ini

digunakan sebagai pedoman penyusunan KUAPPAS dan RAPBD tahun 2023.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Sosial Kota Blitar ini adalah :

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang – Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

- atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
 12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1540);
 15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah

Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 868);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1419);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 590);
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
24. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Blitar;
25. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar tahun 2005 – 2025;

26. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7) ;
27. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
28. Peraturan Walikota Blitar Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Sosial (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 49);
29. Peraturan Walikota Blitar Nomor 60 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2022 nomor 60);
30. Peraturan Walikota Blitar Nomor 71 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar nomor 48 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2022 nomor 71).

1.3. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja ini dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan Dinas Sosial Kota Blitar Tahun 2023 sebagai penjabaran RPJMD dan Renstra tahun 2012-2026, yang disusun berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar tahun 2023.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja ini adalah sebagai pedoman penyusunan KUAPPAS Tahun 2023 dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Blitar Tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renja Dinas Sosial Kota Blitar sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan
- BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
 - 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
 - 2.3. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Blitar
 - 2.3. Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Blitar
 - 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
 - 2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
 - 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
 - 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial Kota Blitar
- BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
- BAB V : Penutup

BAB II

EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Guna memastikan kesinambungan serta kesesuaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan dengan realisasinya, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan renja tahun lalu dan pencapaian renstra. Tujuan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan pencapaian renstra adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana tingkat keberhasilan perangkat daerah dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan terhadap Renstra perangkat daerah serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Namun tahun 2021 merupakan tahun terakhir periode Renstra 2016-2021 dan tahun 2022 adalah tahun pertama periode Renstra periode 2021-2026 dimana dengan diberlakukannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah mengakibatkan adanya perbedaan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya sehingga capaian Renja 2021 dan 2022 tidak bisa disandingkan dalam satu tabel. Oleh karena itu tabel rekapitulasi hasil pelaksanaan Renja disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.1.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja
Dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2022
Dinas Sosial Kota Blitar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021			Target program, kegiatan dan sub kegiatan Renja PD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
									Target Renja PD Th 2021	Realisasi Renja PD Th 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2				3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
						Vol	Satuan							
1 06 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik (84,6)	-	-	-	-	-	Baik (82)	Baik (82)	96,93
1 06 01	2.01				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	%	-	-	-	-	100	100	100
1 06 01	2.01	01			Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	31	dok	-	-	-	-	6	6	19,35
1 06 01	2.01	06			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	59	dok	-	-	-	-	11	11	18,64

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021			Target program, kegiatan dan sub kegiatan Renja PD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
										Target Renja PD Th 2021	Realisasi Renja PD Th 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
							Vol	Satuan							
1	06	01	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100	%	-	-	-	-	100	100	100
1	06	01	2.02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan	28	org	-	-	-	-	28	28	100
1	06	01	2.02	07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun (Bulanan/ Semesteran)	60	dok	-	-	-	-	12	12	20
1	06	01	2.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100	%	-	-	-	-	100	100	100
1	06	01	2.05	10	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah publikasi program/kegiatan perangkat daerah	2	publika si	-	-	-	-	2	2	100

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021			Target program, kegiatan dan sub kegiatan Renja PD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
										Target Renja PD Th 2021	Realisasi Renja PD Th 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
							Vol	Satuan							
						Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti	15	even	-	-	-	-	3	3	20
1	06	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100	%	-	-	-	-	100	100	100
1	06	01	2.06	01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan BangunanKantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia	5	komp	-	-	-	-	5	5	100
1	06	01	2.07	02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi	5	jenis	-	-	-	-	1	1	20
						Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi (TERMASUK MEBELAIR)	4	jenis	-	-	-	-	0	0	0

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021			Target program, kegiatan dan sub kegiatan Renja PD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
										Target Renja PD Th 2021	Realisasi Renja PD Th 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
							Vol	Satuan							
1	06	01	2.07	03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	34	jenis	-	-	-	-	34	34	100
1	06	01	2.08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dos/kotak makanan dan minuman yang tersedia	1750	dos	-	-	-	-	350	350	20
						Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	41	jenis	-	-	-	-	41	41	100
1	06	01	2.08	05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia	9	jenis	-	-	-	-	10	10	111
						Jumlah lembar penggandaan	210.300	lbr	-	-	-	-	38.060	38.060	18,09
1	06	01	2.08	06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	1	bahan bacaan	-	-	-	-	1	1	100

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021				Target program, kegiatan dan sub kegiatan Renja PD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
										Target Renja PD Th 2021	Realisasi Renja PD Th 2021	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)	
							Vol	Satuan								
1	06	01	2.08	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	200	rakor	-	-	-	-	40	40	20	
1	06	01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100	%	-	-	-	-	100	100	100	
1	06	01	2.08	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis rekening yang terbayarkan	240	rek	-	-	-	-	48	48	100	
1	06	01	2.08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah iuran kebersihan yang terbayarkan	60	iuran	-	-	-	-	12	12	20	
1	06	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100	%	-	-	-	-	100	100	100	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021			Target program, kegiatan dan sub kegiatan Renja PD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
														Realisasi Capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
							Vol	Satuan							
1	06	01	2.09	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya	15	unit	-	-	-	-	15	15	100
						Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara	3	unit	-	-	-	-	3	3	100
1	06	01	2.09	06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara	4	jenis	-	-	-	-	4	4	100
1	06	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara	1	unit	-	-	-	-	1	1	100
1	06	01	2.09	11	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara (termasuk mebelair)	2	jenis	-	-	-	-	2	2	100

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021			Target program, kegiatan dan sub kegiatan Renja PD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
										Target Renja PD Th 2021	Realisasi Renja PD Th 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
							Vol	Satuan							
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	100	%	-	-	-	-	100	100	100
1	06	02	2.03		Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan kesejahteraan sosial	100	%	-	-	-	-	100	100	100
1	06	02	2.03	04	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang mengikuti kegiatan peningkatan jejaring dan keterampilan guna peningkatan pelayanan PMKS	60	org	-	-	-	-	50	50	83,33
						Jumlah pengurus/ anggota Orsos, relawan sosial dan PSKS yang menerima tambahan kesejahteraan	297	org	-	-	-	-	297	297	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021			Target program, kegiatan dan sub kegiatan Renja PD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
						Target Renja PD Th 2021	Realisasi Renja PD Th 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
			Vol	Satuan							
		Jumlah peringatan HUT PETA yang difasilitasi	5	even	-	-	-	-	1	1	20
		Jumlah perintis, janda perintis kemerdekaan yang menerima tali asih dan bingkisan lebaran	4	org	-	-	-	-	4	4	100
		Jumlah peringatan HKSN yang difasilitasi	5	even	-	-	-	-	1	1	20
		Jumlah peringatan hari pahlawan yang difasilitasi	5	even	-	-	-	-	1	1	20
		Jumlah peringatan HLUN yang difasilitasi	5	even	-	-	-	-	1	1	20
		Jumlah Juru Kunci Makam dan modin kematian yang dibina	313	org	-	-	-	-	313	313	100

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021			Target program, kegiatan dan sub kegiatan Renja PD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
										Target Renja PD Th 2021	Realisasi Renja PD Th 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
							Vol	Satuan							
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase peningkatan PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	19,69	%	-	-	-	-	2,57	2,57	13,05
1	06	04	2.01		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Anak Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	%	-	-	-	-	100	100	100
1	06	04	2.01	01	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Jumlah Anak yang membutuhkan pelayanan sosial dan Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial yang mendapat bantuan permakanan	120	org	-	-	-	-	125	125	104

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021			Target program, kegiatan dan sub kegiatan Renja PD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
										Target Renja PD Th 2021	Realisasi Renja PD Th 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
							Vol	Satuan							
1	06	04	2.01	02	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	yang membutuh kan pelayanan sosial dan Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial yang mendapat bantuan sandang	50	org	-	-	-	-	10	10	20
1	06	04	2.01	05	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Anak yang membutuh kan pelayanan sosial dan Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial yang mendapatkan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	200	org	-	-	-	-	40	40	20
1	06	04	2.01	12	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah adopsi anak yang difasilitasi	15	org	-	-	-	-	3	3	20
						Jumlah anak/orang terlantar yang mendapat pelayanan pemulangan ke daserah asal	150	org	-	-	-	-	30	30	20

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021			Target program, kegiatan dan sub kegiatan Renja PD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
										Target Renja PD Th 2021	Realisasi Renja PD Th 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
							Vol	Satuan							
						Jumlah Anak yang membutuhkan pelayanan sosial dan Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial yang mendapat kan pelayanan rujukan	50	org	-	-	-	-	10	10	20
1	06	04	2.02		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar dan Gepeng yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	%	-	-	-	-	100	100	100
1	06	04	2.02	01	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah dokumen pendataan/verval data PMKS	5	dok	-	-	-	-	1	1	20
1	06	04	2.02	07	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah psikotik yang bebas pasung	15	org	-	-	-	-	3	3	20

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021			Target program, kegiatan dan sub kegiatan Renja PD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
										Target Renja PD Th 2021	Realisasi Renja PD Th 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
							Vol	Satuan							
						Jumlah PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza (termasuk penyandang disabilitas terlantar dan gepeng) di Luar Panti Sosial yang mendapatkan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	500	org	-	-	-	-	100	100	20
						Jumlah klien hasil razia/penjaringan yang dibina	100	org	-	-	-	-	20	20	20
1	06	04	2.02	13	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza (termasuk penyandang disabilitas terlantar, psikotik/eks psikotik dan Gepeng) di Luar Panti Sosial yang mendapatkan layanan rujukan	308	org	-	-	-	-	68	68	22,08

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021			Target program, kegiatan dan sub kegiatan Renja PD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
										Target Renja PD Th 2021	Realisasi Renja PD Th 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
							Vol	Satuan							
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase penurunan Rumah Tangga tidak mampu yang memperoleh bantuan sosial	6,81	%	-	-	-	-	1,36	1,36	19,97
1	06	05	2.02		Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota	Persentase anak yatim dan/atau piatu yang memperoleh bantuan sosial	100	%	-	-	-	-	100	100	100
1	06	05	2.02	01	Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anak yatim yang difasilitasi mendapatkan bantuan	550	org	-	-	-	-	550	550	100
						Jumlah SLRT yang terfasilitasi	5	unit	-	-	-	-	1	1	20
1	06	05	2.02		Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota	Persentase data DTKS yang diverval	100	%	-	-	-	-	100	100	100

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021			Target program, kegiatan dan sub kegiatan Renja PD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
										Target Renja PD Th 2021	Realisasi Renja PD Th 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
							Vol	Satuan							
1	06	05	2.02	02	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan verifikasi dan validasi DTKS	5	dok	-	-	-	-	1	1	20
						Jumlah laporan verifikasi dan validasi data peserta PBI JKN	5	dok	-	-	-	-	1	1	20
1	06	05	2.02		Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota	Persentase Rumah Tangga Tidak Mampu yang memperoleh bantuan sosial	100	%	-	-	-	-	100	100	100
1	06	05	2.02	03	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah rumah tangga tidak mampu yang menerima bantuan beras	10.264	RTM	-	-	-	-	10.820	10.820	105,42
						Jumlah rumah tangga tidak mampu yang mendapatkan tambahan kesejahteraan	10.264	RTM	-	-	-	-	10.820	10.820	105,42

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021			Target program, kegiatan dan sub kegiatan Renja PD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
										Target Renja PD Th 2021	Realisasi Renja PD Th 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
							Vol	Satuan							
						Jumlah KPM Program Sembako/BSP yang difasilitasi mendapatkan bantuan sosial	3.469	KPM	-	-	-	-	3.469	3.469	100
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase peningkatan PMKS terlatih	160	%	-	-	-	-	32	32	20
					Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PMKS terlatih	100	%	-	-	-	-	20	20	20
					Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah PMKS yang memperoleh pelatihan ketrampilan	400	org	-	-	-	-	40	40	10
						Jumlah KUBE yang dibentuk/ dibina	1	KUBE	-	-	-	-	1	1	100
						Jumlah peserta workshop kewirausahaan bagi fakir miskin	400	org	-	-	-	-	70	70	17,5

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021			Target program, kegiatan dan sub kegiatan Renja PD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
										Target Renja PD Th 2021	Realisasi Renja PD Th 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
							Vol	Satuan							
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana (SPM)	100	%	-	-	-	-	100	100	100
1	06	06	2.01		Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana yang memperoleh bantuan sosial	100	%	-	-	-	-	100	100	100
1	06	06	2.01	01	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	Jumlah ketersediaan Bufferstock untuk penanganan pasca bencana	157	paket	-	-	-	-	37	37	23,57
1	06	06	2.01	04	Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah warga miskin yang sakit/mendapat musibah lainnya yang mendapatkan bantuan	356	org	-	-	-	-	76	76	21,35

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021			Target program, kegiatan dan sub kegiatan Renja PD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
										Target Renja PD Th 2021	Realisasi Renja PD Th 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
							Vol	Satuan							
1	06	06	2.02		Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase TAGANA yang terampil dalam penanganan pasca bencana	100	%	-	-	-	-	81	81	81
1	06	06	2.02	02	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah peserta pembinaan anggota Tagana dan kegiatan ketanggap darurat	32	org	-	-	-	-	25	25	78,13
						Jumlah peserta kegiatan Tagana masuk sekolah	1350	org	-	-	-	-	150	150	11,11
						Jumlah Tagana yang mendapatkan tambahan kesejahteraan	32	org	-	-	-	-	25	25	78,13
						Jumlah peserta Diklat/Bimtek relawan kebencanaan	32	org	-	-	-	-	25	25	78,13

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021			Target program, kegiatan dan sub kegiatan Renja PD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
										Target Renja PD Th 2021	Realisasi Renja PD Th 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
							Vol	Satuan							
						Jumlah pemeliharaan/ pengadaan Sarpras lapangan untuk siaga bencana	2	unit	-	-	-	-	2	2	100
						Jumlah peserta kegiatan HUT Tagana	100	org	-	-	-	-	100	100	100
						Jumlah kegiatan dapur umum lapangan	5	even	-	-	-	-	1	1	20
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase TMP dalam kondisi baik	100	%	-	-	-	-	100	100	100
1	06	07	2.02		Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase TMP yang terpelihara	100	%	-	-	-	-	100	100	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021			Target program, kegiatan dan sub kegiatan Renja PD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Target Renja PD Th 2021	Realisasi Renja PD Th 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
					Vol	Satuan				
1 06 07 2.02 02	Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah TMP yang dipelihara	1	unit	-	-	-	1	1	100

Catatan :

(-) : tidak menjadi indikator pada tahun 2021

Tahun 2022 adalah tahun pertama periode Renstra, secara umum kegiatan berjalan sesuai jadwal. Beberapa kegiatan pelaksanaannya berdasarkan permohonan/permintaan dari masyarakat sehingga capaiannya tergantung permohonan yang diterima. Beberapa indikator program/kegiatan/sub kegiatan penetapan targetnya secara tahunan sehingga pada tahun 2022 target Renstra rata-rata tercapai 100%. Sedangkan indikator kinerja yang penetapan targetnya merupakan akumulasi dari tahun-tahun sebelumnya target Renstra tercapai sebesar 10 – 20%.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Blitar

Analisis kinerja pelayanan Dinas Sosial, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan dinas berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019.

Berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standart Pelayanan Minimal (SPM), Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kota Blitar, capaian kinerja tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Blitar Tahun 2022

No	Indikator	SPM/ Standart Nasional	IKK/ IKU	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	6	7		8	10	11		12	13
	Urusan Sosial											
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	SPM	IKK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sebanyak 37 penyandang disabilitas terlantar telah memperoleh jenis layanan rehabilitasi sosial yang dibutuhkan sesuai hasil assessment
2	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	SPM	IKK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sebanyak 1 anak terlantar telah memperoleh jenis layanan rehabilitasi sosial yang dibutuhkan sesuai hasil assessment
3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	SPM	IKK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sebanyak 125 Lansia terlantar mendapatkan layanan permakanan dan 20 orang diantaranya selain mendapatkan layanan permakanan juga mendapatkan layanan sosial home care
4	Persentase gepeng yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	SPM	IKK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sebanyak 36 gepeng telah memperoleh jenis layanan rehabilitasi sosial yang dibutuhkan sesuai hasil assessment

No	Indikator	SPM/ Standart Nasional	IKK/ IKU	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	6	7	8	8	10	11	12	12	13
5	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kab/Kota	SPM	IKK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pelayanan terhadap korban bencana berdasarkan kejadian bencana baik bencana alam maupun bencana sosial. Sampai dengan semester I tahun 2022 sebanyak 2 korban bencana yang mendapat bantuan bahan makanan
6	Persentase fakir miskin yang berdaya		IKU	-	10%	10%	10%	-	15,71%	10%	10%	Dari 70 alumni peserta pelatihan tahun 2021, berdasarkan monitoring dan evaluasi sebanyak 11 orang telah mulai merintis usaha mandiri.
7	Persentase Penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)		IKU	1	1,45%	1,47%	1,49%	-2,38	-	1,47%	1,49%	Perhitungan dilakukan pada akhir tahun anggaran

Catatan :

(-) : tidak menjadi indikator pada tahun 2021

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Sosial Kota Blitar

Tantangan dalam penurunan kemiskinan di Indonesia saat ini membutuhkan strategi yang komprehensif karena dihadapkan pada kondisi kemiskinan ekstrim. Tingginya jumlah kelompok rentan yang memiliki resiko masuk kedalam kemiskinan apabila terjadi goncangan ekonomi, konflik sosial, bencana alam maupun bencana non alam. Kerentanan tersebut terjadi pada beberapa kelompok penduduk khususnya anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, perempuan, kelompok minoritas dan pekerja sektor informal. Dalam pelaksanaan perluasan cakupan pelayanan dasar dan perlindungan sosial masih terkendala dengan keserasian data penduduk. Meskipun target pelayanan dasar maupun perlindungan sosial telah berbasis NIK namun masih banyak penduduk yang belum melaporkan, menyelaraskan maupun mencatatkan NIK dan bahkan belum memiliki NIK sehingga memerlukan data yang valid sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan.

Masih tingginya angka kemiskinan di Jawa Timur terutama di perkotaan berimplikasi pada berkembangnya PPKS jalanan yang memerlukan upaya pencegahan berkembangnya permasalahan kesejahteraan sosial terutama anak jalanan dan kelompok beresiko secara optimal. Hal ini belum diimbangi dengan dukungan anggaran dan sarana pendukung, kuantitas dan kualitas SDM dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang memadai, penerapan Norma Standar Kriteria dan Prosedur belum konsisten.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diupayakan untuk memperbaiki fungsi sosial PPKS sehingga mereka dapat melaksanakan fungsi sosialnya, menjalin hubungan yang serasi dengan lingkungannya secara wajar dan bermartabat. Karakteristik PPKS cenderung memiliki mobilitas sosial yang sangat dinamis, sering berpindah-pindah sehingga jumlahnya selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu dan tidak akan pernah habis. Sebaran PMKS dengan segala permasalahannya di Kota Blitar tahun 2021 masih tergolong tinggi yaitu sebanyak 12.449 tentunya memerlukan perhatian serius dari pemerintah. Angka ini didominasi oleh kelompok fakir miskin yang mencapai 11.330 jiwa. Upaya mendorong kemandirian fakir miskin dilakukan melalui peningkatan keterampilan, motivasi dan

pendampingan yang intens dalam rangka menumbuhkan rasa percaya diri, mempermudah akses pemasaran dan kendala permodalan. Sinergitas program penanganan fakir miskin dengan Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur menuntut meningkatnya kualitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Rehabilitasi sosial bagi PPKS dengan gangguan keterlantaran, kecacatan, dan ketunasosialan memerlukan peningkatan kualitas pemberi layanan terutama PSKS sebagai ujung tombak pelayanan sosial di masyarakat. Aktivitas, peran serta, kerja sama, soliditas dan semangat PSKS dalam upaya pelayanan dan penanganan masalah PPKS tidak diragukan lagi namun bekal untuk selalu meningkatkan kualitas agar terus bisa beradaptasi dengan setiap perubahan peraturan dan kebijakan kurang didapat dengan maksimal sehingga harus diupayakan peningkatan kapasitas dan kualitas PSKS melalui Bimbingan Teknis/Diklat pelayanan sosial. Keterbatasan sarana dan prasarana menyebabkan kurang maksimalnya pelayanan sosial bagi PPKS yang memerlukan layanan lanjutan. Kondisi ini tidak didukung oleh rasana prasarana pelayanan sosial skala provinsi yang memadai baik kapasitas maupun persebarannya, sedangkan di Kota Blitar hanya ada Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Anak yang tentunya pelayanannya sangat terbatas. Dari uraian permasalahan tersebut maka ditetapkan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) masih cukup tinggi;
2. Belum optimalnya kapasitas dan kualitas SDM Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam pelayanan kesejahteraan sosial;
3. Belum maksimalnya pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
4. Belum tersedianya Sarana Prasarana Pelayanan Sosial skala Kabupaten/Kota bagi PMKS terlantar.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Salah satu tujuan dilakukannya review terhadap Rancangan Awal RKPD adalah untuk menghindari inkonsistensi substansi Renja Dinas Sosial dengan berbagai rumusan yang sudah tertuang dalam Rancangan Awal RKPD, karena Renja tersebut disusun untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan serta target program dan kegiatan yang sudah dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD, Renja Dinas Sosial juga

akan mengalami penyempurnaan setelah Rancangan RKPD tersebut sudah ditetapkan menjadi RKPD dengan Peraturan Walikota Blitar.

Hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dalam kaitannya dengan analisis kebutuhan Renja Dinas Sosial Kota Blitar disajikan dalam Tabel berikut :

Tabel 2.4.1
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kota Blitar

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	6	6	6	10	11	12
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,4 Indeks	4.275.998.547	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,4 Indeks	4.359.669.089	
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	13.630.890	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	30.207.745	Adanya tambahan anggaran untuk survey IKM
1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dok	8.328.180	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dok	3.093.975	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	6	6	6	10	11	12
1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Lap	5.302.710	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Lap	27.113.770	Adanya tambahan anggaran untuk survey IKM
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	3.182.042.694	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	3.458.604.778	Adanya tambahan PNS baru
2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Org	3.176.864.724	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Org	3.453.673.463	
2.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	12 Lap	5.177.869	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	12 Lap	4.931.315	
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	142.112.880	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	117.079.108	Menyesuaikan kebutuhan tahun berjalan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	6	6	6	10	11	12
3.1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	35.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	23.100.000	
3.2	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	28 Orang	107.112.880	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	28 Orang	93.979.108	
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	326.038.283	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	198.819.158	Efisiensi anggaran perjalanan dinas dan langganan koran
4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia	1 Paket	14.568.540	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia	1 Paket	10.091.142	
4.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 Paket	13.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 Paket	12.902.665	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	6	6	6	10	11	12
4.3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	5 Paket	22.380.960	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	5 Paket	17.218.759	
4.4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	10 Paket	32.775.275	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	10 Paket	17.397.000	
4.5	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket	29.625.855	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket	26.368.693	
4.6	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dok	17.010.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dok	5.400.000	
4.7	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Lap	196.677.653	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Lap	100.316.550	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	6	6	6	10	11	12
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100 %	8.400.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100 %	9.124.349	Menyesuaikan standar harga barang
5.1	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	8.400.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	9.124.349	
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	470.040.130	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	445.410.600	Menyesuaikan kebutuhan tahun sebelumnya
6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Lap	101.640.130	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Lap	77.010.600	
6.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Lap	368.400.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Lap	368.400.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	6	6	6	10	11	12
7.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100 %	133.733.670	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100 %	109.547.700	Menyesuaikan standar harga barang
7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	85.160.565	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	73.682.300	
7.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	3.000.000	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	2.240.000	
7.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Dipelihara	2 Jenis	20.000.715	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Dipelihara	2 Jenis	21.163.400	
7.4	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	13.125.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	12.462.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	6	6	6	10	11	12
7.5	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	12.447.390						
II	Program Pemberdayaan sosial		Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	100 %	1.341.512.235	Program Pemberdayaan sosial		Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	100 %	1.256.153.825	
1	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan kesejahteraan sosial	100 %	1.341.512.235	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan kesejahteraan sosial	100 %	1.256.153.825	Penyederhanaan kegiatan yang bersifat ceremonial
1.1	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Lembg	1.341.512.235	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Lembg	1.256.153.825	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	6	6	6	10	11	12
III	Program Rehabilitasi sosial		Persentase peningkatan PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	0,89 %	884.272.308	Program Rehabilitasi sosial		Persentase peningkatan PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	0,89 %	770.077.356	
1	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Persentase Anak Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %	531.009.885	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Persentase Anak Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %	552.459.285	Menyesuaikan kebutuhan layanan
1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	125 Org	351.780.870	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	125 Org	347.426.839	
1.2	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Org	5.147.520	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Org	4.898.158	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	6	6	6	10	11	12
1.3	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Org	115.769.640	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Org	170.840.753	
1.4	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan		Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	55 Org	58.311.855	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan		Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	55 Org	29.293.535	
2	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		Persentase penyandang disabilitas terlantar dan Gepeng yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %	353.262.400	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		Persentase penyandang disabilitas terlantar dan Gepeng yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %	217.618.071	Menyesuaikan kebutuhan layanan
2.1	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	249 Org	264.316.395	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	249 Org	159.130.259	
2.2	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan		Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Orang	88.946.025	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan		Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Orang	58.487.812	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	6	6	6	10	11	12
IV	Program Perlindungan dan jaminan sosial		Persentase penurunan Rumah Tangga tidak mampu yang memperoleh bantuan sosial	1,38 %	19.750.900.365	Program Perlindungan dan jaminan sosial		Persentase penurunan Rumah Tangga tidak mampu yang memperoleh bantuan sosial	1,38 %	19.055.756.358	
1	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase data DTKS yang diverval	100 %	19.750.900.365	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase data DTKS yang diverval	100 %	19.055.756.358	
1.1	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/ Kota	100 Kelrg	256.596.795	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/ Kota	100 Kelrg	103.955.958	Penurunan volume sasaran verval
	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Rumah Tangga Tidak Mampu yang memperoleh bantuan sosial	100 %		Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Rumah Tangga Tidak Mampu yang memperoleh bantuan sosial	100 %		
1.2	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1076 Kelrg 4	19.255.564.440	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1076 Kelrg 4	18.086.376.490	Penurunan KPM penerima Rastrada

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	6	6	6	10	11	12
	Program Perlindungan dan jaminan sosial		Persentase peningkatan PMKS Terlatih	24,2 %		Program Perlindungan dan jaminan sosial		Persentase peningkatan PMKS Terlatih	24,2 %		
	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase PMKS Terlatih	100 %		Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase PMKS Terlatih	100 %		
1.3	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	141 Orang	256.596.795	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	141 Orang	865.423.910	Adanya DSP hasil Musren bang yang diakomodir
V	Program Penanganan Bencana		Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kab/Kota (SPM)	100 %	362.268.165	Program Penanganan Bencana		Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kab/Kota (SPM)	100 %	197.457.897	
1	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		Persentase korban bencana yang memperoleh bantuan sosial	100 %	59.302.110	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		Persentase korban bencana yang memperoleh bantuan sosial	100 %	56.476.804	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	6	6	6	10	11	12
1.2	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	37 Orang	21.241.710	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	37 Orang	20.229.100	
1.3	Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Orang	38.060.400	Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Orang	36.247.704	
2	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		Persentase TAGANA yang terampil dalam penanganan pasca bencana	100 %	302.966.055	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		Persentase TAGANA yang terampil dalam penanganan pasca bencana	100 %	140.981.093	Berkurang nya jumlah anggota Tagana
2.1	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	27 Orang	302.966.055	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	27 Orang	140.981.093	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	6	6	6	10	11	12
VI	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan		Persentase TMP dalam kondisi baik	100 %	65.234.358	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan		Persentase TMP dalam kondisi baik	100 %	47.756.314	
1	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Persentase TMP yang terpelihara	100 %	65.234.358	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Persentase TMP yang terpelihara	100 %	47.756.314	Menyesuaikan kebutuhan
1.1	Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1.133 Makam	65.234.358	Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1.133 Makam	47.756.314	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menyusun Renja OPD, salah satu tahapan proses yang tidak boleh diabaikan adalah menampung usulan kegiatan yang berasal aspirasi masyarakat. Hal ini sangat penting dilaksanakan karena pada hakekatnya masyarakatlah yang akan menjadi penerima manfaat dari program dan kegiatan kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD.

Dinas Sosial Kota Blitar berupaya untuk menampung aspirasi masyarakat salah satunya melalui pelaksanaan Musrenbang dan pokok-pokok pikiran legislatif. Selanjutnya semua usulan ditelaah dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial untuk ditetapkan apakah usulan tersebut diamomodir atau tidak. Rekapitulasi hasil Musrenbang dan Pokok-Pokok Pikiran Legislatif disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.5.1

**Rekapitulasi Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Kota Blitar**

Nama PD : Dinas Sosial

NO	USULAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
I	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kota Blitar	Persentase peningkatan PMKS terlatih		
	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Persentase PMKS terlatih		
	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kota Blitar	Jumlah orang yang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat kewenangan Kabupaten/Kota		
	Kec. Sukorejo				
1	Pelatihan memasak kue basah dan kue kering bagi warga miskin/tidak mampu	Kel. Sukorejo	Jumlah peserta pelatihan keterampilan	10 Orang	Diakomodir
2	Pelatihan menjahit bagi warga miskin/tidak mampu	Kel. Sukorejo	Jumlah peserta pelatihan keterampilan	10 Orang	Diakomodir

NO	USULAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
	Kec. Kepanjenkidul				
1	Pelatihan menjahit bagi warga miskin	Kel. Sentul	Jumlah peserta pelatihan keterampilan	25 Orang	Diakomodir
2	Pelatihan keterampilan ODGJ	Kel. Ngadirejo	Jumlah ODGJ yang mendapatkan pendampingan sosial	3 Orang	Diakomodir, berupa pendampingan sosial sesuai hasil assessmen yang dilakukan
3	Pelatihan tata rias rambut untuk warga miskin	Kel. Bendo	Jumlah peserta pelatihan keterampilan	1 Paket	Diakomodir
4	Pelatihan produk olahan jahe merah	Kel. Bendo	Jumlah peserta pelatihan keterampilan	1 Paket	Diakomodir
	Kec. Sananwetan				
1	Pembinaan/sosialisasi/pelatihan wira usaha bagi warga miskin	Kel. Gedog	Jumlah peserta pelatihan keterampilan	35 Orang	Diakomodir
II	Program Pemberdayaan Sosial		Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial		
	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan kesejahteraan sosial		

NO	USULAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota		
	Kec. Sananwetan				
1	Pembinaan/sosialisasi PSKS, modin kematian dan juru kunci makam	Kel. Gedog	Jumlah peserta pembinaan	50 Orang	Diakomodir
	Pokok-Pokok Pikiran DPRD				
	NIHIL				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dan Propinsi

Salah satu prioritas nasional yang selaras dengan amanah pembangunan di bidang sosial adalah meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing dengan arah kebijakan penghapusan kemiskinan ekstrem. Arah kebijakan Kementerian Sosial dalam rangka mendukung hal tersebut antara lain meningkatnya kemandirian sosial ekonomi penduduk miskin dan rentan, meningkatnya kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial serta meningkatnya kualitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Dalam rangka meningkatkan kemandirian sosial ekonomi penduduk miskin dan rentan dilakukan melalui upaya pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan keberfungsian sosial dengan pengembangan sistem rehabilitasi sosial dalam rangka memulihkan disfungsi sosial, peningkatan kemandirian sosial ekonomi keluarga miskin dan rentan. Peningkatan kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial dilakukan melalui peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Peningkatan kualitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial melalui penguatan skema layanan dan pendataan terpadu yang partisipatif, tepat, cepat, efektif dan terintegrasi, peningkatan kualitas DTKS yang memasukkan indikator kemiskinan dan kerentanan multi dimensi serta pengembangan metode perangkian penduduk yang konsisten dengan sistem graduasi masing-masing program.

Seperti diketahui selama kurun waktu 2021 dan 2022 terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin di Jawa Timur, bahkan terdapat kemiskinan ekstrem di beberapa daerah. Oleh karena itu, selaras dengan prioritas nasional tersebut, provinsi Jawa Timur menetapkan salah satu prioritas Jawa Timur tahun 2023 adalah peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan. Upaya pengentasan kemiskinan memerlukan sinergi program dan kegiatan antara pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Sosial merumuskan kebijakan yang mencerminkan pelaksanaan visi dan misi Gubernur yaitu terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial dengan memperhatikan kelompok masyarakat yang rentan dengan penyelenggaraan pembangunan

kesejahteraan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan meningkatkan partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Prioritas kebijakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur antara lain mendukung percepatan penanganan kemiskinan di Jawa Timur melalui perluasan target sasaran penerima PKH Plus hingga 38 kabupaten/kota dengan komponen lanjut usia ≥ 70 tahun, disabilitas berat dan wanita rawan sosial ekonomi, pengembangan KUBE fakir miskin sebagai embrio usaha mikro, serta mendorong kabupaten/kota untuk aktif update data melalui SIKS NG.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Sosial Kota Blitar

Penyusunan arah kebijakan pembangunan Kota Blitar tidak terlepas dari arah kebijakan nasional maupun provinsi. Sejalan dengan tema pembangunan Kota Blitar Tahun 2023 yaitu Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Normalisasi Ekonomi Daerah dan Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik, salah satu prioritas daerah yaitu Pemberdayaan Masyarakat untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran.

Masalah kemiskinan dan pengangguran merupakan tanggung jawab seluruh stake holder. Dari dimensi sosial, Dinas Sosial Kota Blitar sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial di daerah, merupakan OPD teknis yang akan menyelenggarakan program, kegiatan dan sub kegiatan urusan sosial sesuai kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Program Pemberdayaan Sosial, Perlindungan Sosial dan Rehabilitasi Sosial disinergikan dengan program pusat, provinsi, antar OPD se Kota Blitar bahkan tidak menutup kemungkinan dengan kabupaten/kota lain serta pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan prioritas pembangunan daerah, Dinas Sosial sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah menetapkan tujuan dan sasaran Renja yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Wali Kota. Berdasarkan misi yang diemban maka tujuan yang ingin dicapai dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial Kota Blitar adalah **“Menurunnya ketimpangan antar penduduk miskin”** dan **“Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat”**. Sebagai penjabaran tujuan, dirumuskan sasaran yang akan dicapai dalam

kurun waktu tahunan. Dalam kondisi ideal penerapan sasaran akan sangat baik apabila sasaran ditetapkan secara spesifik, dapat diukur, dapat dicapai jangka panjang, waktu penyampaianya jelas, berorientasi pada hasil nyata. Dalam mengemban tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, ditetapkan tujuan, sasaran dan indikator kinerja Dinas Sosial Kota Blitar sebagai berikut :

Tabel : 3.2.1
Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial Kota Blitar
Tahun 2023

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/TARGET 2023	FORMULASI PERHITUNGAN
Tujuan 1 : Meningkatnya tata kelola Perangkat Daerah Tujuan 2 : Menurunkan ketimpangan pendapatan masyarakat Tujuan 3 : Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Target : 84,39 Indeks Keparahan Kemiskinan Target : 0,23 Persentase PMKS Target : 7,26%	- - $\frac{\text{Jumlah PMKS}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$
Sasaran 1 : Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah Sasaran 2 : Meningkatnya penanganan fakir miskin	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Target : 82,4 Persentase fakir miskin yang berdaya Target : 10%	- $\frac{\text{Jml fakir miskin peserta pelatihan yang bekerja/ mulai merintis usaha pada thn n-1}}{\text{Jml fakir miskin peserta pelatihan pada thn n-1}} \times 100\%$

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/TARGET 2023	FORMULASI PERHITUNGAN
Sasaran 3 : Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase penurunan PMKS Target : 1,49%	(Jumlah PMKS thn n-1)- (Jml PMKS thn n) Jml PMKS thn n-1 x 100%

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial bertolak pada pencapaian visi dan misi Kota Blitar yang ingin dicapai yang dijabarkan dan RPJMD Kota Blitar tahun 2021 – 2026 dan Renstra Dinas Sosial tahun 2021-2026. Dinas Sosial Kota Blitar melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang mengemban misi ketiga Kota Blitar yaitu “Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis digital” pada tujuan “Meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat” dengan sasaran:

1. Menurunnya tingkat ketimpangan antar penduduk miskin.
2. Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat.

Terdapat dua hal pokok yang merupakan tugas Dinas Sosial Kota Blitar dalam pembangunan kesejahteraan sosial yaitu meningkatkan taraf kesejahteraan sosial PPKS dan meningkatkan partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dalam rangka melaksanakan dua amanah besar tersebut Dinas Sosial Kota Blitar menetapkan Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2023 yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator kinerja dan kerangka pendanaannya yang disusun berdasarkan RKPD Kota Blitar tahun 2023 dengan memperhatikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dengan fokus pada :

1. Peningkatan perlindungan dan pemberian jaminan sosial bagi PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yang berkelanjutan.
2. Komitmen pimpinan untuk mengatasi masalah PMKS dengan dukungan, kerja sama dan sinergitas program antar OPD, pemerintah provinsi dan pusat serta melibatkan peran dunia usaha melalui CSR.
3. Peningkatan pengelolaan pemanfaatan shelter PMKS sebagai tempat penampungan sementara bagi PMKS terlantar sebelum mendapatkan rehabilitasi sosial di panti/Lembaga Kesejahteraan Sosial/yayasan/ lembaga lainnya.

4. Peningkatan kemampuan/kapasitas sumber daya baik ASN maupun PSKS melalui Bimtek/Diklat pelayanan dan penanganan masalah sosial.
5. Peningkatan pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan.

Adapun penetapan rencana kerja dan pendaan Dinas Sosial Kota Blitar selengkapnya sebagaimana tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
Dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Kota Blitar

OPD : Dinas Sosial

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ PAGU Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/PAGU Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Kota Blitar						
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				25.486.870.839				28.507.975.417
1.06.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		82,4 Indeks	4.418.454.115			82,8 Indeks	4.553.955.095
1.06.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar		100 %	30.207.745			100 %	14.312.435
1.06.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		6 Dok	3.093.975	DAU		6 Dok	8.744.589

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ PAGU Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/PAGU Indikatif
1.06.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		12 Laporan	27.113.770	DAU		12 Laporan	5.567.846
1.06.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar		100 %	3.458.604.778			100 %	3.738.087.323
1.06.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		28 Org	3.453.673.463	DAU		28 Org	3.732.650.454
1.06.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		12 Laporan	4.931.315	DAU		12 Laporan	5.436.869
1.06.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar		100 %	122.329.108			100 %	149.218.524

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ PAGU Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/PAGU Indikatif
1.06.01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		2 Paket	23.100.000	DAU		2 Paket	34.000.000
1.06.01.2.05.10	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan		28 Orang	99.229.108	DAU		28 Orang	115.218.524
1.06.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar		100 %	211.733.629			100 %	333.520.197
1.06.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia		1 Paket	14.955.188	DAU		1 Paket	15.296.967
1.06.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		3 Paket	13.919.276	DAU		3 Paket	15.000.000
1.06.01.2.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan		5 Paket	18.621.784	DAU		5 Paket	23.500.008

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ PAGU Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/PAGU Indikatif
1.06.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan		10 Paket	29.468.000	DAU		10 Paket	33.064.039
1.06.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		2 Paket	29.052.831	DAU		2 Paket	31.107.148
1.06.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan		12 Dokumen	5.400.000	DAU		12 Dokumen	17.860.500
1.06.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		30 Laporan	100.316.550	DAU		30 Laporan	197.691.535
1.06.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan		100 %	9.124.349			%	8.820.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ PAGU Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/PAGU Indikatif
1.06.01.207.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		1 Unit	9.124.349	DAU		1 Unit	8.820.000
1.06.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar		100 %	456.041.724			100 %	110.856.512
1.06.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		48 Laporan	87.641.724	DAU		48 Laporan	106.722.137
1.06.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		13 Laporan	368.400.000	DAU		13 Laporan	4.134.375
1.06.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar		100 %	130.412.782			100 %	159.140.104

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ PAGU Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/PAGU Indikatif
1.06.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		15 Unit	73.682.300	DAU		15 Unit	89.418.593
1.06.01.2.09.05	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		1 Unit	2.240.000	DAU		1 Unit	2.500.000
1.06.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Dipelihara		2 Jenis	24.677.800	DAU		2 Jenis	37.220.501
1.06.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		1 Unit	29.812.682	DAU		1 Unit	13.781.250
1.06.02	Program Pemberdayaan sosial	Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial		100 %	1.427.266.448			100 %	1.427.266.448

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ PAGU Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/PAGU Indikatif
1.06.02.2.03	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan kesejahteraan sosial		100 %	1.427.266.448			100 %	1.427.266.448
1.06.02.2.03.04	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		7 Lembaga	1.427.266.448	DAU		7 Lembaga	1.427.266.448
1.06.04	Program Rehabilitasi sosial	Persentase peningkatan PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial		0,89 %	955.903.751			0,89 %	1.039.001.738
1.06.04.2.01	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Anak Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti		100 %	660.998.113			100 %	729.350.818

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ PAGU Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/PAGU Indikatif
1.06.04.2.01.01	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota		125 Org	347.426.839	DAU		125 Org	369.369.914
1.06.04.2.01.02	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota		10 Org	4.898.158	DAU		10 Org	5.404.896
1.06.04.2.01.05	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota		80 Org	279.379.581	DAU		80 Org	293.348.560
1.06.04.2.01.12	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota		55 Org	29.293.535	DAU		55 Org	61.227.448

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ PAGU Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/PAGU Indikatif
1.06.04.2.02	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar dan Gepeng yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti		100 %	294.905.638			100 %	309.650.920
1.06.04.2.02.07	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota		270 Org	236.443.312	DAU		270 Org	248.265.478
1.06.04.2.02.13	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota		70 Orang	58.462.326	DAU		70 Orang	61.385.442
1.06.05	Program Perlindungan dan jaminan sosial	Persentase penurunan Rumah Tangga tidak mampu yang memperoleh bantuan sosial		1,38 %	18.437.454.778			1,38 %	21.059.614.248
1.06.05.2.02	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data DTKS yang diverval		100 %	18.437.454.778			100 %	21.059.614.248

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ PAGU Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/PAGU Indikatif
1.06.05.2.02.01	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota		100 Keluarg a	103.955.958	DAU		100 Keluarg a	269.426.635
1.06.05.2.02	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga Tidak Mampu yang memperoleh bantuan sosial		100 %				100 %	
1.06.05.2.02.03	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		10764 Keluarga	17.761.653.869	DAU, DBHCHT		10764 Keluarga	20.218.342.662
1.06.05	Program Perlindungan dan jaminan sosial	Persentase peningkatan PMKS Terlatih		24,2 %				24,2 %	
1.06.05.2.02	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PMKS Terlatih		100 %				100 %	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ PAGU Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/PAGU Indikatif
1.06.05.2.02.04	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		100 Orang	571.844.951	DAU, DBHCHT		100 Orang	571.844.951
1.06.06	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kab/Kota (SPM)		100 %	200.035.433			100 %	380.381.574
1.06.06.2.01	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana yang memperoleh bantuan sosial		100 %	51.554.340			100 %	62.267.216
1.06.06.2.01.01	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota		37 Orang	18.653.196	DAU		37 Orang	22.303.796

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ PAGU Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/PAGU Indikatif
1.06.06.2.01.04	Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota		70 Orang	32.901.144	DAU		70 Orang	39.963.420
1.06.06.2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase TAGANA yang terampil dalam penanganan pasca bencana		84 %	148.481.093			84 %	318.114.358
1.06.06.2.02.02	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota		27 Orang	148.481.093	DAU		27 Orang	318.114.358
1.06.07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase TMP dalam kondisi baik		100 %	47.756.314			100 %	47.756.314

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ PAGU Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/PAGU Indikatif
1.06.07.2.01	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase TMP yang terpelihara		100 %	47.756.314			100 %	47.756.314
1.06.07.2.01.02	Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota		1.133 Makam	47.756.314	DAU		1.135 Makam	47.756.314

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kota Blitar memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial tahun 2023, sebagai penjabaran Renstra Dinas Sosial dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar 2023. Rencana ini disusun setelah mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun berjalan.

1.1 Catatan penting dalam Penyusunan Renja

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kota Blitar Tahun 2023, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai nilai yang strategis dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Kota Blitar.

Renja ini disusun melalui tahapan-tahapan yang telah ditentukan, memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun berjalan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator dan kerangka pendanaannya, dengan tetap memperhatikan tugas dan fungsi Dinas Sosial.

1.2 Kaidah – Kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Sosial Kota Blitar secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Renja Tahun 2023 sesuai tugas dan kewenangannya dan menjaga keselarasan antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Guna efektivitas dan efisiensi dilakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaannya.
3. Monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2023.

1.3 Rencana Tindak lanjut

Dalam rangka pencapaian target kinerja organisasi, Dinas Sosial merencanakan tindak lanjut sebagai berikut :

- a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial tahun 2023 yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, indikator/target indikator serta kebutuhan anggaran berpedoman pada Renja Dinas Sosial Tahun 2023.

- b. Meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan instansi terkait, pilar-pilar sosial dan seluruh stake holder dalam pelaksanaan Renja ini sehingga akan dicapai hasil kinerja yang optimal.
- c. Meningkatkan kapasitas SDM pelaksana dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta program, kegiatan dan sub kegiatan sejalan dengan tuntutan perkembangan layanan bidang sosial.

Akhirnya, Rencana Kerja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Sosial Kota Blitar tahun 2023. Program dan kegiatan Dinas Sosial tahun 2023 diharapkan dapat memberikan pelayanan kesejahteraan sosial yang maksimal guna mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat umumnya.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 4 Agustus 2022


KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA BLITAR

SAD SASMINTARTI, SH, MM
Pembina Tk. I
NIP. 196601191986022002